



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyajikan perbandingan target dan realisasi perbandingan tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan narasi terhadap data perbandingan tersebut dalam Laporan Kinerja yang akan datang.
2. Menyajikan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya sesuai dengan kondisi kinerja bukan hanya sebatas formalitas dalam Laporan Kinerja yang akan datang
3. Menyajikan info upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam Laporan Kinerja yang akan datang.
4. Menyajikan analisis keberhasilan / kegagalan untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi dalam Laporan Kinerja yang akan datang
5. Menyajikan pembahasan / evaluasi atas laporan kinerja yang telag disusun untuk memperbaiki dokumen kinerja dalam Laporan Kinerja yang akan datang

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **86.2** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	30	28	93.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	30	25.4	84.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1	11.3	75.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5	21.5	86.00%

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
Nilai Hasil Evaluasi	100	88.6	86.2	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dalam penyusunannya bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab bagian perencanaan. Perencanaan kinerja belum menjadi komitmen dan kepedulian bersama seluruh unit/satuan kerja dan menjadi komitmen bersama juga dalam pencapaiannya

2.) Pengukuran Kinerja

1. Pimpinan Unit Kerja tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja
2. Data kinerja yang dikumpulkan tidak mendukung pengukuran kinerja
3. Tindaklanjut/langkah aksi tidak diikuti perubahan anggaran

3.) Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja tidak menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan tidak membandingkan dengan realisasi kinerja level kabupaten.
2. Laporan Kinerja tidak dilengkapi dengan data dukung mengenai upaya perbaikan yang dilakukan
3. Laporan Kinerja tidak digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
4. Laporan Kinerja tidak menyampaikan penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana kinerja.
5. Laporan Kinerja tidak dasar dalam evaluasi keberhasilan kinerja

4.) Evaluasi Internal

1. Evaluasi Internal yang dilaksanakan belum dibuktikan oleh SDM yang kompeten.

2. Masih ditemukan sebagian kecil belanja tidak relevan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Kepala Unit Kerja agar melaksanakan pembahsan perencanaan kinerja yang disusun dengan seluruh unit/satuan kerja dan bersama berkomitmen untuk pencapaiannya.

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Kepala Unit Kerja agar melaksanakan pengukuran kinerja dan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perubahan anggaran.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Kepala Unit Kerja untuk mereviu Laporan Kinerja yang disusun agar menyajikan analisis dan evaluasi terhadap sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai , menyajikan upaya perbaikan yang dilakukan, menyajikan penjelasan terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian rencana kinerja.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Kepala Unit Kerja agar

1. menetapkan Tim Evaluasi Internal oleh SDM yang telah mengikuti Blmtek AKIP
2. menyusun anggaran sesuai dengan Cascading yang telah ditetapkan

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka